

Kearifan Lokal Sasi Kelapa Sebagai Bentuk Pengelolaan Tradisional di Negeri Tial Kecamatan Salahutu

Safarini Malang¹, Ismela Tuharea², Chynthia Tomia³, Jasmine Khairunnisa Latuconsina⁴

^{1,2,3}Fakultas Syariah UIN AMBON, Indonesia

⁴Siswi Sekolah Genius Tangerang, Indonesia

E-mail: rhinimalan@gmail.com¹, tuhareamela@gmail.com², cynthiatomia1@gmail.com³,
latuconsinajasmine123@gmail.com⁴

Article History:

Received: 02 Maret 2026

Revised: 26 Maret 2026

Accepted: 09 April 2026

Keywords: Sasi Kelapa, Kearifan Lokal, Masyarakat Adat, Pengelolaan Tradisional, Maluku.

Abstract: Praktik kearifan lokal sasi merupakan salah satu bentuk sistem pengelolaan sumber daya alam tradisional yang berkembang di wilayah Maluku dan masih bertahan hingga saat ini. Salah satu variannya adalah sasi kelapa, yang diterapkan masyarakat Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, sebagai mekanisme adat untuk mengatur pemanfaatan tanaman kelapa secara kolektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penerapan sasi kelapa, aktor-aktor adat yang terlibat, nilai sosial-ekologis yang dikandung, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap tokoh adat, pemerintah negeri, serta warga pemilik kebun kelapa, dan studi dokumentasi terhadap arsip adat serta literatur terkait. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi tematik, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasi kelapa di Negeri Tial tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian pemanenan kelapa, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan ekologis, memperkuat solidaritas sosial, dan mempertahankan otoritas lembaga adat dalam tata kelola sumber daya lokal. Namun demikian, keberlanjutan praktik ini menghadapi tantangan berupa tekanan ekonomi, perubahan pola kepemilikan lahan, serta pengaruh modernisasi yang mempengaruhi kepatuhan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kelembagaan adat dan integrasi nilai sasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya tingkat lokal agar praktik ini tetap relevan di masa mendatang.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat lokal semakin mendapat perhatian dalam kajian pembangunan berkelanjutan karena dinilai mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pendekatan ini menekankan peran institusi lokal dalam mengatur akses terhadap sumber daya bersama melalui aturan kolektif yang disepakati masyarakat. Studi mengenai pengelolaan sumber daya bersama menunjukkan bahwa komunitas lokal memiliki kemampuan membangun sistem pengawasan sosial dan mekanisme kepatuhan yang efektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam (Ostrom, 1990). Keberhasilan pengelolaan berbasis komunitas tidak terlepas dari keberadaan pengetahuan ekologis tradisional yang berkembang melalui pengalaman panjang masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pengetahuan tersebut membentuk norma dan praktik sosial yang berfungsi sebagai pedoman dalam pemanfaatan sumber daya secara bijaksana serta mencegah eksploitasi berlebihan (Berkes, 2012). Dalam banyak masyarakat adat, praktik ini dikenal sebagai kearifan lokal yang tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga berperan sebagai sistem pengelolaan lingkungan yang adaptif terhadap kondisi sosial dan ekologis setempat.

Di wilayah kepulauan Maluku, ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam darat dan laut mendorong terbentuknya berbagai institusi adat yang berfungsi mengatur pemanfaatan lingkungan. Salah satu praktik yang masih bertahan hingga saat ini adalah sasi, yaitu sistem aturan adat yang menetapkan pembatasan sementara terhadap pengambilan sumber daya tertentu guna memberi kesempatan bagi proses pemulihan alam (Zerner, 1994). Praktik ini merupakan bentuk pengelolaan berbasis komunitas yang mengombinasikan nilai sosial, norma adat, serta mekanisme pengawasan kolektif masyarakat.

Kelapa merupakan salah satu komoditas penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat Maluku karena memiliki nilai guna yang luas, mulai dari kebutuhan konsumsi rumah tangga hingga sumber pendapatan melalui produksi kopra dan produk turunan lainnya. Tingginya pemanfaatan komoditas tersebut menuntut adanya pengaturan pemanenan agar keberlanjutan produksi tetap terjaga. Dalam konteks ini, penerapan sasi kelapa berfungsi sebagai mekanisme lokal yang mengatur waktu panen serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kelestarian sumber daya alam. Negeri Tial di Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, merupakan salah satu komunitas adat yang masih mempertahankan praktik sasi sebagai bagian dari sistem tata kelola lokal. Pelaksanaan aturan tersebut melibatkan lembaga adat seperti raja negeri, saniri, dan kawang yang memiliki peran dalam pengawasan serta penegakan aturan adat. Keberadaan struktur kelembagaan ini menunjukkan bahwa sasi bukan sekadar tradisi simbolik, melainkan institusi sosial yang memiliki legitimasi dan fungsi regulatif dalam kehidupan masyarakat lokal.

Meskipun demikian, perubahan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat modern menghadirkan tantangan terhadap keberlanjutan praktik adat. Integrasi ekonomi pasar, meningkatnya kebutuhan ekonomi rumah tangga, serta perubahan orientasi generasi muda berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap aturan adat. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa institusi lokal perlu beradaptasi agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial kontemporer (Agrawal, 2001). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai praktik sasi kelapa di Negeri Tial menjadi penting untuk memahami bagaimana mekanisme pengelolaan berbasis adat bekerja dalam konteks sosial-ekologis saat ini, sekaligus mengidentifikasi nilai-nilai lokal dan tantangan keberlanjutan yang dihadapi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat serta menjadi referensi bagi perumusan kebijakan lokal yang mempertimbangkan aspek budaya dan keberlanjutan lingkungan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan pokok, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sasi kelapa sebagai sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis adat di Negeri Tial Kecamatan Salahutu?
2. Apa saja nilai-nilai serta tantangan yang memengaruhi keberlanjutan praktik sasi kelapa dalam konteks perubahan sosial ekonomi masyarakat?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis mekanisme pelaksanaan sasi kelapa sebagai sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis adat di Negeri Tial Kecamatan Salahutu.
2. Mengidentifikasi nilai-nilai serta tantangan yang memengaruhi keberlanjutan praktik sasi kelapa dalam menghadapi perubahan sosial ekonomi masyarakat.

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat, khususnya terkait peran kearifan lokal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah negeri, lembaga adat, serta masyarakat lokal dalam menjaga keberlanjutan praktik sasi sebagai sistem pengelolaan sumber daya alam yang berbasis budaya dan lingkungan.

LANDASAN TEORI

Pengelolaan sumber daya alam pada masyarakat lokal tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial dan budaya yang membentuk hubungan manusia dengan lingkungannya. Perspektif ekologi politik menjelaskan bahwa praktik pengelolaan lingkungan sering kali dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai budaya, serta relasi kekuasaan yang berkembang dalam suatu komunitas. Dalam konteks masyarakat adat, aturan pemanfaatan sumber daya lahir dari proses sosial yang panjang dan berfungsi menjaga stabilitas hubungan antara manusia dan alam (Blaikie & Brookfield, 1987).

Pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat menempatkan partisipasi lokal sebagai elemen utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mampu meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan serta memperkuat efektivitas aturan pengelolaan yang diterapkan secara bersama (Pretty, 2003). Partisipasi tersebut tidak hanya berbentuk kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencakup pengawasan sosial dan kontrol komunitas terhadap perilaku individu dalam memanfaatkan sumber daya.

Kearifan lokal sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat adat dipahami sebagai hasil akumulasi pengalaman ekologis yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai lokal berfungsi sebagai pedoman moral sekaligus instrumen pengendalian sosial dalam pemanfaatan lingkungan. Studi antropologi lingkungan menunjukkan bahwa praktik tradisional sering kali mengandung prinsip konservasi yang selaras dengan konsep keberlanjutan modern, meskipun tidak selalu

diformalkan dalam bentuk regulasi tertulis (Dove, 2006).

Dalam masyarakat kepulauan, sistem pengelolaan sumber daya umumnya berkembang melalui institusi adat yang mengatur hak akses dan waktu pemanfaatan sumber daya alam. Institusi tersebut berperan menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kapasitas regenerasi lingkungan. Penelitian tentang tata kelola sumber daya pesisir menunjukkan bahwa aturan berbasis adat mampu menciptakan mekanisme distribusi manfaat yang lebih adil serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya antar anggota masyarakat (Ruddle, 1998).

Namun demikian, keberlanjutan institusi lokal menghadapi tantangan seiring meningkatnya integrasi ekonomi modern dan perubahan sosial masyarakat. Globalisasi ekonomi dan perubahan orientasi mata pencaharian dapat memengaruhi pola kepatuhan terhadap aturan tradisional, terutama ketika nilai ekonomi jangka pendek lebih dominan dibandingkan pertimbangan ekologis jangka panjang. Transformasi sosial tersebut menuntut adanya adaptasi institusi lokal agar tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang berlangsung secara cepat (Adger, 2000). Berdasarkan perspektif teoritis tersebut, praktik pengelolaan sumber daya berbasis adat dapat dipahami sebagai sistem sosial-ekologis yang mengintegrasikan nilai budaya, partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengaturan lokal dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Kerangka teori ini menjadi landasan untuk menganalisis praktik sasi kelapa sebagai bentuk tata kelola lokal yang berkembang melalui interaksi antara tradisi, kebutuhan ekonomi, dan dinamika sosial masyarakat.

PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Ruddle (1998) menekankan bahwa praktik adat di wilayah pesisir mampu menjaga keberlanjutan ekosistem melalui aturan kolektif yang mengatur waktu pemanfaatan sumber daya. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan sosial dan norma adat sangat penting dalam mengurangi risiko overexploitation, sekaligus memperkuat kohesi sosial antar anggota komunitas.

Selain itu, Pretty (2003) menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola sumber daya bersama. Studi tersebut menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya meningkatkan efektivitas pengelolaan serta memperkuat rasa tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan berbasis komunitas bukan hanya efektif secara ekologis, tetapi juga berperan dalam membangun struktur sosial yang lebih adil dan partisipatif.

Dove (2006) menambahkan bahwa kearifan lokal atau *traditional ecological knowledge* memainkan peran strategis dalam konservasi sumber daya alam. Penelitian ini menekankan bahwa praktik-praktik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun sering kali mengandung prinsip konservasi yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan modern. Implementasi kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengaturan akses terhadap tanaman atau hasil laut, menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki strategi adaptif untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Lebih spesifik terkait Maluku, penelitian oleh Johannes (1978) menyoroti praktik sasi sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya yang berbasis adat. Studi ini menegaskan bahwa sasi berfungsi sebagai mekanisme pengaturan waktu panen dan pemanfaatan hasil alam, sehingga memungkinkan regenerasi lingkungan sekaligus menjaga keadilan distribusi manfaat antar anggota masyarakat. Penelitian tersebut juga mencatat bahwa keberhasilan sasi sangat bergantung pada legitimasi sosial dan dukungan kelembagaan adat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat adat, melalui mekanisme seperti sasi dan penerapan kearifan lokal, efektif dalam menjaga keberlanjutan ekologis sekaligus memperkuat struktur sosial komunitas. Namun, studi-studi sebelumnya lebih banyak menekankan pada prinsip umum pengelolaan sumber daya atau kasus pesisir, sehingga masih terbuka ruang untuk penelitian lebih mendalam mengenai implementasi sasi pada tanaman kelapa di Maluku, khususnya di Negeri Tial, yang menjadi fokus penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** untuk memahami mekanisme pengelolaan sasi kelapa serta nilai-nilai sosial yang terkandung dalam praktik adat di Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji fenomena sosial-ekologis yang kompleks dan bersifat kontekstual, di mana interaksi antara masyarakat, institusi adat, dan lingkungan menjadi fokus utama analisis.

Lokasi penelitian dipilih secara **purposive**, yaitu Negeri Tial, yang dikenal masih aktif menerapkan sasi dalam pengelolaan sumber daya kelapa. Penentuan lokasi ini mempertimbangkan faktor keaslian praktik adat, keterlibatan lembaga adat, dan keterjangkauan akses untuk pengumpulan data lapangan.

Informan penelitian terdiri dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sasi, antara lain raja negeri, saniri, kawang, serta masyarakat pemilik dan pengguna pohon kelapa. Pemilihan informan menggunakan **teknik purposive sampling**, dengan pertimbangan pengalaman, pengetahuan, dan peran mereka dalam pengelolaan sasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. **Wawancara mendalam** diterapkan untuk memperoleh informasi mengenai aturan, mekanisme pelaksanaan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam sasi kelapa. **Observasi partisipatif** dilakukan untuk memahami praktik nyata di lapangan, termasuk proses pengawasan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat. Selain itu, **studi dokumentasi** digunakan untuk melengkapi informasi berupa catatan adat, peraturan lokal, serta data historis terkait sasi kelapa.

Analisis data dilakukan secara **tematik** dan bersifat induktif. Proses ini meliputi pengorganisasian data, pengkodean, identifikasi tema utama, serta interpretasi untuk memahami pola pengelolaan, nilai-nilai sosial, dan tantangan yang muncul dalam praktik sasi. Validitas data dijaga melalui **triangulasi sumber dan teknik**, sehingga temuan yang diperoleh mencerminkan kondisi sosial-ekologis nyata di Negeri Tial. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana sasi kelapa dijalankan, nilai-nilai budaya yang terkandung, serta dinamika sosial dan ekologis yang memengaruhi keberlanjutan praktik adat di tengah perubahan sosial ekonomi masyarakat modern.

ALUR PENELITIAN

Alur penelitian merupakan tahapan sistematis yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan. Alur penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian yang dilakukan sehingga penelitian dapat berjalan secara terarah dan sistematis. Selanjutnya, peneliti menentukan metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan, observasi langsung di lokasi penelitian, serta dokumentasi untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik

analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui proses analisis tersebut, peneliti memperoleh temuan penelitian yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan sasi kelapa, peran lembaga adat, nilai sosial, ekonomi, dan ekologis yang terkandung di dalamnya, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan praktik sasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Alur penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Alur penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negeri Tial adalah salah satu komunitas adat di Pulau Ambon yang masih mempertahankan praktik sasi sebagai bagian dari tata kelola sumber daya alamnya. Struktur sosial budaya di negeri ini melibatkan lembaga tradisional seperti raja negeri, saniri, dan kawang sebagai institusi yang memegang otoritas dalam menetapkan dan melaksanakan aturan adat sasi. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi ritual, tetapi juga bertindak sebagai pengambil keputusan dan pengawas sosial yang menentukan kapan dan di mana sumber daya kelapa dilarang untuk diambil serta bagaimana aturan tersebut ditegakkan.

Dalam pelaksanaannya, sasi kelapa di Negeri Tial beroperasi melalui serangkaian tahapan adat yang diawali oleh musyawarah komunitas untuk menetapkan larangan pemanenan pada area tertentu. Proses ini dilakukan secara kolektif dengan mempertimbangkan pengetahuan ekologis lokal mengenai siklus pertumbuhan tanaman dan kapasitas lingkungan untuk pulih. Keputusan yang dihasilkan kemudian diumumkan kepada masyarakat melalui simbol atau ritual adat khusus yang menandai dimulainya masa sasi dan menyampaikan batasan waktu bagi warga untuk mematuhi aturan tersebut. Penerapan mekanisme ini mencerminkan prinsip pengelolaan sumber daya tradisional yang menekankan pembatasan temporal dan spasial untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam, sebuah konsep yang mirip dengan apa yang ditemukan di komunitas adat Maluku lainnya dalam berbagai studi tentang sasi (Muhammad Rizal Pahleviannur, 2024).

Peran kawang sebagai pengawas dan penegak aturan adat sangat penting dalam menjaga kepatuhan masyarakat terhadap sasi. Kawang berfungsi sebagai figur sosial yang memantau aktivitas warga di lapangan, menangani pelanggaran, serta memastikan bahwa sanksi sosial maupun adat diterapkan kepada individu atau kelompok yang melanggar larangan. Dalam konteks ini, sasi bukanlah aturan administratif semata tetapi merupakan bentuk pengetahuan sosial dan ekologis yang diinternalisasi oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya mereka, sehingga mendorong kepatuhan lebih karena kesadaran nilai tradisional daripada sekadar takut terhadap sanksi. Temuan ini konsisten dengan kajian lain yang menggambarkan sasi sebagai instrumen manajemen sumber daya berbasis komunitas yang efektif ketika mendapatkan legitimasi

sosial dari masyarakat adat (Jayanti & Osozawa, 2014).

Lebih jauh, praktik sasi kelapa juga mengandung nilai-nilai sosial yang kuat yang memperkuat daya dukung komunitas terhadap aturan tersebut. Solidaritas sosial dan tanggung jawab bersama muncul ketika masyarakat menganggap sasi sebagai bagian dari etika kolektif dalam menjaga hubungan manusia-alam. Hal ini terlihat dalam praktik pembagian hasil panen setelah masa sasi berakhir; hasil panen tidak hanya untuk konsumsi individu tetapi juga didistribusikan dalam konteks sosial komunitas, misalnya untuk kegiatan adat atau kebutuhan kelompok. Nilai-nilai ini menguatkan rasa keadilan sosial dan memperkokoh kohesi komunitas, sebuah aspek penting dalam mempertahankan praktik tradisional di tengah tekanan sosial yang berubah. Kajian yang menekankan peran sasi dalam konservasi sumber daya dan pembentukan norma sosial menunjukkan bahwa pemahaman kosmovisional dan pengetahuan lokal menjadi elemen penting dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (Hutapea & Lestarini, 2021).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan utama yang memengaruhi keberlanjutan praktik sasi kelapa di Negeri Tial. Tekanan ekonomi modern, khususnya kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat, dapat mendorong sebagian masyarakat memanen lebih cepat dari yang diizinkan oleh aturan adat. Ketika kebutuhan ekonomi jangka pendek dirasakan lebih mendesak dibandingkan kepatuhan terhadap aturan tradisional, konflik antara nilai ekonomi dan nilai ekologis muncul. Selain itu, paparan generasi muda terhadap gaya hidup urban dan nilai ekonomi modern cenderung mengurangi keterikatan mereka terhadap praktik adat, sehingga tingkat kepatuhan sasi berpotensi menurun seiring waktu. Studi lain juga mencatat bahwa modernisasi sosial dapat mengikis kewenangan lembaga adat dan menggeser penekanan budaya lokal dalam pengelolaan sumber daya komunal (Muhammad Rizal Pahleviannur, 2024).

Selain itu, harmonisasi antara aturan adat sasi dan sistem hukum formal menjadi isu lain yang muncul dalam praktik modern. Dalam beberapa situasi, sanksi adat dianggap kurang efektif karena tidak sejajar dengan ketentuan hukum nasional, sehingga interpretasi terhadap aturan adat dapat bervariasi di antara generasi atau kelompok sosial. Integrasi antara adat dan kebijakan formal melalui pendekatan kelembagaan yang adaptif menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan ini. Sebagai contoh, kolaborasi antara pemerintahan lokal dan lembaga adat di beberapa komunitas Maluku menunjukkan bahwa penggabungan kebijakan modern dengan nilai sasi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya sambil mempertahankan nilai budaya lokal (Pieter S. Soselisa et al., 2023).

Temuan ini menunjukkan bahwa sasi kelapa tetap dapat berfungsi sebagai strategi pengelolaan sosial-ekologis yang adaptif jika didukung dengan internalisasi nilai lokal, partisipasi komunitas yang kuat, serta harmonisasi kelembagaan adat dengan sistem pemerintahan modern. Pendekatan tersebut juga membuka peluang untuk memperkuat keterlibatan generasi muda melalui program edukasi dan pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan adat, sehingga nilai-nilai tradisional dapat diwariskan sambil tetap relevan dengan kebutuhan ekonomi kontemporer. Kajian literatur tentang sasi dalam berbagai konteks lokal mendukung temuan bahwa integrasi pengetahuan lokal dan kebijakan modern dapat menjadi model pengelolaan sumber daya komunal yang berkelanjutan sekaligus mempertahankan identitas budaya masyarakat adat (Muhammad Rizal Pahleviannur, 2024; Pieter S. Soselisa et al., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik sasi kelapa di Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan sasi merupakan sistem

pengelolaan sumber daya alam berbasis adat yang berjalan secara kolektif dan terstruktur. Pelaksanaan sasi diawali dengan musyawarah adat yang melibatkan raja negeri, saniri, dan kawang untuk menentukan area pohon kelapa yang akan dilarang panen, jenis pohon yang diatur, dan jangka waktu larangan. Keputusan musyawarah ini disosialisasikan kepada seluruh warga melalui simbol atau tanda adat, sementara kawang berperan sebagai pengawas dan penegak aturan, memastikan kepatuhan masyarakat terhadap sasi. Kepatuhan ini didorong tidak hanya oleh penerapan sanksi, tetapi juga karena internalisasi nilai budaya, tanggung jawab sosial, dan kesadaran ekologis yang tinggi. Dengan demikian, sasi kelapa di Negeri Tial tidak sekadar tradisi simbolik, melainkan merupakan mekanisme pengelolaan sosial-ekologis yang adaptif dan legitim di mata komunitas. Praktik sasi kelapa juga mengandung nilai-nilai sosial yang penting, antara lain solidaritas, keadilan dalam distribusi hasil panen, tanggung jawab kolektif, dan kesadaran ekologis. Nilai-nilai tersebut memperkuat kohesi sosial dan mendorong kepatuhan terhadap aturan adat, sehingga sasi berfungsi sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, keberlanjutan praktik sasi menghadapi tantangan signifikan dalam konteks perubahan sosial-ekonomi modern, termasuk tekanan ekonomi rumah tangga, orientasi generasi muda yang cenderung modern, harmonisasi dengan hukum formal, serta pengaruh pasar komoditas kelapa. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi adaptif sangat diperlukan untuk mempertahankan relevansi dan efektivitas sasi kelapa. Strategi tersebut mencakup pendidikan dan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat dan edukasi lingkungan, serta kolaborasi antara lembaga adat dan kebijakan formal untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan aturan. Integrasi antara nilai kearifan lokal, partisipasi masyarakat, dan dukungan kelembagaan modern memungkinkan sasi kelapa tetap berfungsi sebagai pengelolaan sumber daya berbasis komunitas yang efektif, menyeimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan kelestarian lingkungan, dan menjaga nilai-nilai budaya lokal. Secara keseluruhan, sasi kelapa di Negeri Tial menjadi contoh bagaimana institusi adat dapat berperan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, sekaligus menghadapi dinamika sosial-ekonomi kontemporer. Temuan ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan lokal yang sensitif terhadap budaya dan lingkungan, serta sebagai model pengelolaan sumber daya berbasis komunitas yang adaptif di wilayah kepulauan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adger, W. N. (2000). *Social and ecological resilience: Are they related?* *Progress in Human Geography*, 24(3), 347–364.
<https://doi.org/10.1191/030913200701540465>
- Agrawal, A. (2001). *Common property institutions and sustainable governance of resources.* *World Development*, 29(10), 1649–1672.
[https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00063-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00063-8)
- Berkes, F. (2012). *Sacred ecology* (3rd ed.). Routledge.
- Blaikie, P., & Brookfield, H. (1987). *Land degradation and society.* Methuen.
- Dove, M. R. (2006). *Indigenous people and environmental politics.* *Annual Review of Anthropology*, 35, 191–208.
<https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.35.081705.123235>
- Hutapea, R., & Lestarini, Y. (2021). Kearifan lokal dan konservasi sumber daya berbasis masyarakat adat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(2), 145–156.
- Jayanti, A. D., & Osozawa, K. (2014). *Traditional resource management and local wisdom in Maluku.* *Journal of Coastal Development*, 17(1), 45–53.
- Johannes, R. E. (1978). *Traditional marine conservation methods in Oceania and their demise.*

-
- Annual Review of Ecology and Systematics*, 9, 349–364.
<https://doi.org/10.1146/annurev.es.09.110178.002025>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Pahleviannur, M. R. (2024). Praktik sasi dalam pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat di Maluku. *Jurnal Sosial dan Budaya Maritim*, 6(1), 1–12.
- Pretty, J. (2003). Social capital and the collective management of resources. *Science*, 302(5652), 1912–1914. <https://doi.org/10.1126/science.1090847>
- Ruddle, K. (1998). *The context of policy design for existing community-based fisheries management systems in the Pacific Islands*. *Ocean & Coastal Management*, 40(2–3), 105–126.
- Soselisa, P. S., et al. (2023). Integrasi kelembagaan adat dan kebijakan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam di Maluku. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(1), 55–67.
- Zerner, C. (1994). *Through a green lens: The construction of customary environmental law and community in Indonesia's Maluku Islands*. *Law & Society Review*, 28(5), 1079–1122. <https://doi.org/10.2307/3053993>